

ABSTRAK

WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT

**Oleh
Nurul Rachma Tiyas**

Usaha di sektor pertambangan dalam menjalankan operasionalnya kerap memerlukan dukungan dari badan usaha lain, termasuk dalam penyediaan jasa sewa menyewa alat berat sebagaimana dilakukan antara PT X dan PT Y. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor 11/Y-X/X/2021 yang memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Perjanjian ini melahirkan prestasi, yang apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut serta menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila wanprestasi terjadi.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh sumber data sekunder dengan menggunakan jenis bahan primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi timbul akibat keterlambatan pembayaran oleh PT Y atas jasa sewa alat berat dan operator dari PT X, yang merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan secara non-litigasi melalui somasi dan negosiasi, namun tidak membuahkan hasil, sehingga PT X memilih penyelesaian melalui jalur litigasi dengan mendaftarkan diri sebagai kreditor konkuren dalam proses PKPU atas PT Y. Penelitian ini menekankan pentingnya pencantuman klausul hak dan kewajiban secara eksplisit dalam kontrak serta perlunya strategi penyelesaian sengketa yang tepat untuk menjaga kepastian hukum dan hubungan bisnis yang berkelanjutan.

Kata Kunci: wanprestasi, perjanjian sewa menyewa alat berat, penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

DEFAULT IN HEAVY EQUIPMENT RENTAL EXECUTION

By
Nurul Rachma Tiyas

Business operations in the mining sector often require support from other business entities, including the provision of heavy equipment rental services, as exemplified by the arrangement between PT X and PT Y. This cooperation was formalized in “Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor 11/Y-X/X/2021”, which has the binding force of law. This agreement gives rise to legal obligations (prestasi), the non-fulfillment of which constitutes a default (wanprestasi). This research aims to analyze the forms of default that occurred in the implementation of the said agreement and to explain the dispute resolution mechanisms that can be pursued in the event of such a default (wanprestasi).

This research employs a normative legal research method, utilizing a statutory and case study approach. It is supported by secondary data sources, incorporating primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that a default arose from PT Y's delayed payment for the heavy equipment and operator rental services provided by PT X, which constituted a breach of the contractual terms. Dispute resolution was initially attempted through non-litigation methods, specifically through formal warnings (somasi) and negotiations. However, these efforts failed to yield a result, compelling PT X to pursue a litigation pathway by registering as an unsecured creditor (kreditor konkuren) in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) proceedings against PT Y. This research underscores the importance of explicitly stipulating rights and obligations clauses within contracts and the necessity of a sound dispute resolution strategy to maintain legal certainty and sustainable business relationships.

Keywords: default, heavy equipment agreements, dispute resolution.